

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI
DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI PADA BPKAD KOTA PALEMBANG)**

Siti Aisyah Nurulhuda¹⁾, Achmad Hizazi²⁾, Rico Wijaya Z³⁾

Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Jambi, Jambi^{1,2,3)}

e-mail: sitiaisyahnh@gmail.com¹⁾, hizazi@unja.ac.id²⁾, ricowijaya@unja.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai variabel moderasi Studi Pada BPKAD kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang didapat dari penyebaran kuisioner yang disebar pada karyawan BPKAD dan pada para Auditor di inspektorat Kota Palembang. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 65, teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan SPSS 24, dengan menggunakan uji Instrumen, Uji Validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, Analisis regresi berganda, analisis regresi moderasi, uji determinan, uji t dan uji F, dengan hasil akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, partisipasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan antara transparansi terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan antara partisipasi terhadap kualitas laporan keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, semuanya sejenis kuasi moderasi

Kata kunci: ; BPKAD, Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi

Abstract

Therefore, the quality of financial statements produced by BPKAD reflects the quality of regional government financial governance. This study aims to examine the effects of accountability, transparency, participation, and Government Accounting Standards on the quality of financial statements, with human resource competence as a moderating variable. This study was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of Palembang City. The data used in this study are primary data obtained through the distribution of questionnaires to BPKAD employees and auditors at the Inspectorate of Palembang City. The sampling technique used in this study is purposive sampling, with a total sample of 65 respondents. The data analysis technique uses SPSS version 24, including instrument testing, validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple regression analysis, moderated regression analysis, coefficient of determination testing, t-test, and F-test.

The results show that accountability has a significant effect on the quality of financial statements, transparency has a significant effect on the quality of financial statements, participation has a significant effect on the quality of financial statements, and Government Accounting Standards have a significant effect on the quality of financial statements. Simultaneously, accountability, transparency, participation, and Government Accounting Standards significantly affect the quality of financial statements. Human resource competence is able to moderate the relationship between accountability and the quality of financial statements, transparency and the quality of financial statements, participation and the quality of financial statements, as well as Government Accounting Standards and the quality of financial statements, all of which are classified as quasi-moderation.

Keywords: BPKAD, Accountability, Transparency, Participation,

1. PENDAHULUAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Lembaga ini bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (bpkad.palembang.go.id). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Prosesnya membutuhkan waktu yang panjang dan upaya yang konsisten. Di samping itu, implementasinya memerlukan komitmen yang kuat serta sikap optimis yang tinggi. Oleh karena itu, BPKAD perlu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan senantiasa melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap sistem birokrasi yang ada, agar menjadi lebih efisien, efektif, akuntabel, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat.

Munculnya paradigma tersebut memicu timbulnya tuntutan dari masyarakat akan adanya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai lembaga pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang dituntut untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang berfokus pada kepentingan publik, Hal ini dilakukan melalui penyediaan layanan yang akuntabel, transparan, dan bermutu. Oleh karena itu kota Palembang sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya melalui penguatan kelembagaan BPKAD. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Palembang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, capaian tersebut tidak berarti bebas dari tantangan. Masih ditemukan permasalahan seperti ketidaktepatan dalam pencatatan aset, perbedaan pencatatan antar perangkat daerah, serta kurang optimalnya peran SDM dalam pengawasan anggaran, di samping itu, BPK juga masih sering menemukan penyimpangan saat penyelenggaraan audit laporan keuangan pemerintahan. Pemerintah daerah, Kota Palembang Menjadi salah satu yang menarik untuk diperhatikan seperti yang dikutip dari (PALTV.CO.ID, 2025) penyidik kejaksaan menggeledah Kantor BPKAD Palembang terkait temuan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang tahun 2018 sampai dengan 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal terkait pengelolaan kas dalam penyusunan Laporan Keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Palembang tahun 2018 sampai dengan 2020 tersebut, beberapa permasalahan pengelolaan kas di Kota Palembang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1
Permasalahan Terkait Kas Kota Palembang

Tahun	Permasalahan Terkait Kas
2018	Pengelolaan rekening kas umum daerah belum memadai, salah satunya terjadi karena mekanisme penerbitan pencarian dana belum sesuai ketentuan
2019	Penatausahaan dan pengelolaan kas pemerintah kota Palembang belum memadai, salah satunya karena penatausahaan dan pengelolaan kas pada salah satu kerja perangkat daerah (SKPD) tidak tertib
2020	Relisasi belanja barang dan jasa yang menggunakan mekanisme pembayaran uang persediaan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: Data yang diolah 2025.

Ringkasan LHP atas LKPD Kota Palembang terkait Kas menunjukkan bahwa permasalahan kas yang berkaitan dengan uang persediaan terjadi berulang, baik dari sisi prosedur pengelolaan uang persediaan ataupun realisasi belanja yang menggunakan mekanisme uang persediaan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Di antara faktor utama yang menjadi sorotan dalam studi ini adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi dalam penyusunan anggaran, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, serta sejauh mana kompetensi SDM dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor-faktor tersebut. penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi anggaran, dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di lingkungan BPKAD Kota Palembang, dengan mempertimbangkan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi. Artinya, penelitian ini juga menguji sejauh mana kompetensi SDM memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara empiris bagi pengembangan kebijakan di BPKAD Kota Palembang, khususnya dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM guna mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik dalam memperluas kajian di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori agensi membahas hubungan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemilik modal sebagai prinsipal. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Alchian dan Demsetz pada tahun 1972, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut teori ini, hubungan keagenan terjadi ketika seorang prinsipal, baik individu maupun kelompok, menunjuk agen untuk melaksanakan tugas tertentu dan memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, manajemen perusahaan bertindak sebagai agen profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pengelolaan organisasi yang efisien, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan bagi pemilik sambil menjaga pengeluaran tetap optimal. Di sisi lain, prinsipal atau pemilik (seperti pemegang saham) berupaya memperoleh laba setinggi mungkin dari dana yang telah mereka investasikan, serta memberikan imbalan kepada agen dalam bentuk insentif, baik berupa kompensasi finansial maupun non-finansial. (Lasmono, B., & Siregar, 2021)

Adapun beberapa variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pihak yang diberikan amanah (agen) untuk mempertanggungjawabkan, menyampaikan, melaporkan, serta menjelaskan seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang diemban kepada pihak pemberi amanah (prinsipal), yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Yaya, R., & Wahyuli, 2019). Akuntabilitas merupakan tindakan tanggung jawab pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Dalam hal tersebut, pemerintah daerah mesti mampu memberi informasi dalam rangka memenuhi hak-hak publik. Dalam pemerintah daerah akuntabilitas didefinisikan sebagai keharusan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan yaitu masyarakat (Murniati, 2021).
- b. Transparansi adalah prinsip yang menandakan bahwa semua pihak memperoleh jaminan untuk mendapatkan akses dan kebebasan mengenai informasi kebijakan, informasi proses pembuatan, dan pelaksanaan, serta berbagai hasil yang dapat diperoleh tentang pelaksanaan organisasi (Mony, Trice Febrinda Gabriela, 2022). Transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka kepada publik mengenai pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta menunjukkan ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipasi anggaran adalah peran serta individu sebagai sumber daya manusia dalam menyalurkan tujuan, pertimbangan, serta kepentingannya dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. (Pratiwi, N. R., Diana, N., & Junaidi 2022). Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen. (Sari, 2018).
- d. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat prinsip akuntansi yang digunakan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan instansi pemerintah. SAP dituangkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang mencakup penomoran, judul, isi, serta ketentuan waktu berlakunya. (Siregar, 2017). Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
- e. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan atau keahlian individu di dalam sebuah organisasi atau suatu sistem lembaga untuk mengimplementasikan kemampuannya dan melaksanakan fungsi serta kewenangannya dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Debby Chinstin Sihasale, Sulistiyo, 2018). kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Fiane Rina Sambuaga, Adolf Z.D Siahay, 2020)
- f. Laporan keuangan merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai posisi keuangan pemerintah dalam suatu periode tertentu, yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja organisasi publik (Sujana, E., Kurniawan Saputra, K. A., & Manurung 2020). Laporan ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyampaikan kondisi finansial kepada para pemangku kepentingan, khususnya sebagai bentuk akuntabilitas kepada pihak yang

memiliki otoritas, seperti pemegang saham atau masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, laporan keuangan berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik selama satu tahun anggaran (Pratiwi, N. R., Diana, N., & Junaidi, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pengukuran skala ordinal yang digunakan untuk mengukur sub-sub dari variabel. Skala ordinal merupakan nominal angka yang memiliki kandungan serta memberikan pengertian tingkatan. Dalam pengukuran untuk variabel yang ada pada masing-masing variabel independen menggunakan teknik dengan skala likert, yang mana hasil variabel yang akan diukur diuraikan menjadi komponen indikator dari variabel, lalu indikator akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam menyusun item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan ini dibutuhkan data yang akurat, objektif dan mendukung untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kuisisioner (angket) yaitu dengan menyebar daftar pernyataan yang akan diisi oleh responden yang merupakan pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan atau auditor pada Inspektorat kota Palembang. Kuisisioner tersebut yaitu terkait dengan menggunakan faktor-faktor Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), Partisipasi (X_3), Standar Akuntansi Pemerintah (X_4) Kualitas Laporan Keuangan (Y), Kompetensi Sumber Daya Manusia (M).

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 65, teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan SPSS 24, dengan menggunakan uji Instrumen, Uji Validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, Analisis regresi berganda, analisis regresi moderasi, uji determinan, uji t dan uji F.

Tabel 1.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Akuntabilitas (X_1)	1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	1. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien 3. Keseesuaian program dengan visi, misi dan tujuan 4. Kebajikan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Transparansi (X_2)	1. Informatif 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan	1. Keterbukaan informasi publik 2. Kemudahan akses informasi 3. Ketersediaan laporan keuangan/kinerja secara terbuka
3.	Partisipasi (X_3)	1. Keikutsertaan 2. Besarnya Pengaruh 3. Memberikan Pendapat	1. Keterlibatan pelaksanaan 2. Pelaksanaan program 3. Pengawasan dan evaluasi
4.	Standar Akuntansi Pemerintah (X_4)	1. Basis Akuntansi 2. Nilai Historis 3. Realisasi 4. Substansi mengungguli Bentuk Formal 5. Periodisitas 6. Konsistensi 7. Pengungkapan Kelengkapan 8. Penyajian wajar.	1. kepatuhan terhadap SAP 2. penerapan basis akrual 3. penyajian laporan keuangan sesuai SAP 4. pengukuran dan penilaian aset/nominal SAP 5. pengungkapan dala, CALK 6. kualitas Pelaporan sesuai SAP

5.	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Relevan 2. Andal 3. Informasi yang dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	1. Disajikan tepat waktu 2. Dapat diverifikasi 3. Disusun secara konsisten antar periode 4. Tidak menimbulkan ambigius
6.	Kompetensi Sumber Daya Manusia(M)	1. Pemahaman tentang akuntansi 2. SDM yang berkualitas 3. SDM yang memadai 4. Peran dan tanggungjawab 5. Pelatihan keahlian dalam tugas 6. Sosialisasi peraturan baru	1. Pengetahuan 2. Skill 3. Konsep diri 4. Sifat/karakter 5. Motivasi kerja

Sumber: Data yang diolah 2025

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.3
Hasil Uji signifikansi Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.377	1.344		-4.002	.000
X1	.387	.039	.480	9.949	.000
X2	.218	.044	.218	4.944	.000
X3	.259	.053	.237	4.859	.000
X4	.196	.049	.194	4.019	.000
M	-1.445	.106	-1.052	-13.655	.000
X1*M	.017	.002	.910	9.422	.000
X2*M	.008	.002	.356	4.488	.000
X3*M	.009	.002	.321	3.973	.000
X4*M	.007	.002	.274	3.028	.004

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS) 2025

1. Pengujian hipotesis pertama

Diketahui nilai sig. Untuk akuntabilitas (X1) kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan diperoleh nilai t_{hitung} 9,949 yang arinya lebih besar dari t_{tabel} 1,666 ($9,949 > 1,666$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh antara akuntabilitas (X1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 48,0,% dibuktikan dengan nilai *Strandardized coefficients beta*. Sebesar 0,480 atau 48,0% sedangkan 52,% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain.

2. Pengujian hipotesis kedua

Diketahui nilai sig. Untuk transparansi (X2) kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan diperoleh nilai t_{hitung} 4,944 yang arinya lebih besar dari t_{tabel} 1,666 ($4,499 > 1,666$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh antara transparansi (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 21,8,% dibuktikan dengan nilai *Strandardized coefficients beta*. Sebesar 0,218 atau 21,8% sedangkan 78,2,% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain.

3. Pengujian hipotesis ketiga

Diketahui nilai sig. Untuk partisipasi (X3) kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan diperoleh nilai t_{hitung} 4,859 yang arinya lebih besar dari t_{tabel} 1,666 ($4,859 > 1,666$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh antara partisipasi (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 23,7% dibuktikan dengan nilai *Strandardized coefficients beta*. Sebesar 0,237 atau 23,7% sedangkan 76,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain.

4. Pengujian hipotesis keempat

Diketahui nilai sig. Untuk standar akuntansi pemerintah (X4) kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan diperoleh nilai t_{hitung} 4,019 yang arinya lebih besar dari t_{tabel} 1,666 ($4,019 > 1,666$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintah (X4) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 19,4% dibuktikan dengan nilai *Strandardized coefficients beta*. Sebesar 0,194 atau 19,4% sedangkan 80,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain.

5. Pengujian Hipotesis keenam

Nilai signifikasi interaksi variabel Akuntabilitas (X1) dengan kompetensi sumber daya manusia (M) menunjukkan nilai sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($9,422 < 1,666$) sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan variabel Akuntabilitas terhadap variabel kualitas laporan keuangan, yang artinya H_6 diterima. Hasil pengujian dengan moderasi menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas keuangan, dengan kompetensi sumber daya manusia yang kompeten serta menerapkan Akuntabilitas dengan maksimal seperti menyediakan, menyajikan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja maka kualitas laporan akan semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

6. Pengujian Hipotesis ketujuh

Nilai signifikasi interaksi variabel transparansi (X2) dengan kompetensi sumber daya manusia (M) menunjukkan nilai sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($4,488 < 1,666$) sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan variabel transparansi terhadap variabel kualitas laporan keuangan, atau berpengaruh yang artinya H_7 diterima. Hasil pengujian dengan moderasi menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas keuangan, dengan kompetensi sumber daya manusia yang kompeten serta menerapkan transparansi dengan maksimal seperti menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan jelas. Maka kualitas laporan akan semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

7. Pengujian Hipotesis kedelapan

Nilai signifikasi interaksi variabel partisipasi (X3) dengan kompetensi sumber daya manusia (M) menunjukkan nilai sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($3,973 < 1,666$) sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan variabel partisipasi terhadap variabel kualitas laporan keuangan, atau berpengaruh yang artinya H_8 diterima. Hasil pengujian dengan moderasi menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh partisipasi terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas keuangan, dengan kompetensi sumber daya manusia yang kompeten serta akan turut serta berpartisipasi dengan maksimal dalam setiap proses penyusunan laporan keuangan. Maka kualitas laporan akan semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

8. Pengujian Hipotesis kesembilan

Nilai signifikansi interaksi variabel standar akuntansi pemerintah (X4) dengan kompetensi sumber daya manusia (M) menunjukkan nilai sebesar $0,004 < 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($3,028 < 1,666$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan variabel standar akuntansi pemerintah terhadap variabel kualitas laporan keuangan, atau berpengaruh yang artinya H9 diterima. Hasil pengujian dengan moderasi menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas keuangan, dengan kompetensi sumber daya manusia yang kompeten maka standar akuntansi pemerintah tim standar akuntansi pemerintah penyusun akan mengikuti dan menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam setiap proses penyusunan laporan keuangan. Maka kualitas laporan akan semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Tabel 1.4
Hasil Uji signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	698.399	4	174.600	218.945	.000 ^b
Residual	47.848	60	.797		
Total	746.246	64			

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS) 2025

Dari hasil output SPSS yang terlihat pada tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2), partisipasi (X3) dan standar akuntansi pemerintah (X4) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 218,945 > F_{tabel} 2,74$. Artinya hipotesis (H5) diterima. Dengan kata lain menyatakan bahwa variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2), partisipasi (X3) dan standar akuntansi pemerintah (X4) secara bersama-sama mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan (Y) pada BPKAD Kota Palembang.

Tabel 1.5
Hasil Analisis Koefisien Determinan (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.967 ^a	.936	.932	.893

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS) 2025

Untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah nilai R yang ada pada tabel di atas. Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai R sebesar 0,967 yang menunjukkan hubungan yang sangat erat antara variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan standar akuntansi pemerintah terhadap Kualitas laporan keuangan karena nilai mendekati. Variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, dalam penelitian ini nilai yang digunakan adalah nilai adjusted R². Nilai *adjusted* R² sebesar 0,936 hal ini berarti 93,6% variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan

oleh empat variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan standar akuntansi pemerintah. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model penelitian sebesar 6,4% (100% - 93.6%).

5. KESIMPULAN

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan , Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan maka ketika penyusunan laporan keuangan dilakukan Akuntebel, transparan, dan partisipasi karyawan yang signifikan serta sesuai dengan SAP yang berlaku maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan BPKAD kota Palembang
2. Akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain ketika akuntabilitas transparansi, partisipasi dan standar akuntansi pemerintah, diterapkan secara bersama-sama maka akan memperbaiki kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Palembang.
3. Kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan variabel Akuntabilitas terhadap variabel kualitas laporan keuangan, Kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan variabel transparansi terhadap variabel kualitas laporan keuangan, Kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan variabel partisipasi terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan variabel standar akuntansi pemerintah terhadap variabel kualitas laporan keuangan Yang artinya semakin kompeten Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKAD kota Palembang maka akan semakin besar kemungkinan penyusunan laporan keuangan sesuai standar pemerintah dampaknya adalah akan semakin baik pula kualitas laporan yang akan dimiliki oleh BPKAD kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Debby Chinstin Sihasale, Sulistiyo, dan S. W. S. (2018). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sitem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi(Studi Emreris pada SKPD BPKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 6(1)(2337–5663).
- Elvia, P. dewi. (2018). Good Governance, dan transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 7(2).
- Fiane Rina Sambuaga, Adolf Z.D Siahay, dan S. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM sebagai Variabel Moderasi(Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Keerom). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5 (1), 105–124.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate lanjutan Dengan Program SPSS (VII)*. Universitas Diponegoro.
- Hamsiar. (2017). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi(Studi Kasus Kabupaten PINRANG)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.
- Indriyanto. (2017). *Metode Penelitian Suatu Pengantar Teori dan Praktek (Komparatif*

- Bahan Ajar Metodologi Penelitian Berbasis Kurikulum KKNJ*). Noerfikri.
- Lasmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah. Ekuitas*, 3(2), 203–210.
- Liu, M. S. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lubis, Z. (2021). *Statistika Terapan Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*.
- M. ziqry Ramadhan, dan N. (2024). Pengaruh Pemahaman SAP dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM sebagai Variabel Moderasi (Studi Emperis pada OPD BPKAD Pemerintah Kota Bima). *Jurnal Bisnis Net*, 7(1)(261–3982).
- Mardatilla, S. A. (2022). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. J-ISCAN.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Andi.
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data Sekunder*. PT Rajagrafindo Persada.
- Mony, Trice Febrinda Gabriela, and D. S. (2022). Analisis Tata Kelola Keuangan Pada Gereja Kristen Indonesia Merisi Indah.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10)(4523–37).
- Murniati, S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah. *EQUITY. Journal of Economics, Management and Accounting*, 16(2), 139–148.
- Peraturan Presiden No. 17. (2010). *tentang Sistem Akuntansi Publik Pemerintah*.
- Philadhelphia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Pratiwi, N. R., Diana, N., & Junaidi, J. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*,. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(05).
- Priyatno. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis data Denga SPSS 20*,. Andi.
- Putri, Olivia Lungit Astari, and S. A. (2021). Pengaruh Penerapan PSAK 45 Dan Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.” *Owner. International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 29–41.
- Rahayuni. (2013). *Pengaruh Budaya organisasi, Komitmen Organisasi, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Pada Dinas Pendaptan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Grobongan*. Universitas Muhammadiyah.
- Reski. (2024). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)*,. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare,).
- Sari, D. N. (2018). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pt. Hadji Kalla Toyota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.

- Septa Krisanatalia. (2024). *Pengaruh Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi Pada Greja Kristen Jawi Wetan Rejoagung Kecamatan Semboro, Jember*. Institut Teknologi Dan Sains Mandala Jember.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Edisi 2). CV. Alfabeta.
- Sujana, E., Kurniawan Saputra, K. A., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9).
- Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN. Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Yaya, R., & Wahyuli, H. (2019). Determinants of Financial Statements Quality in Village Government. 5th International Conference on Accounting and Finance. *ICAF 2019*, 2(1), 134–138.